

KOMPARASI KINERJA KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT BERBASIS *BEHAVIOURAL BENCHMARKING* DAN PENGARUHNYA PADA PAJAK PENGHASILAN

David Chandra¹
Ni Ketut Rasmini²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: dc.hotaru@gmail.com/telp: +62 82 113 938 850

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penetapan rasio *Behavioural Model Benchmarking* oleh DJP untuk sektor BPR di kabupaten Badung telah sesuai dengan kondisi nyata serta untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan BPR terhadap pembayaran pajak penghasilan badan. Objek penelitian ini adalah BPR yang beroperasi di kabupaten Badung. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 36 BPR untuk periode 3 tahun yaitu tahun 2011-2013. Metode penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui pengambilan data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis uji beda dua rata-rata sampel independen dan analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil analisis uji beda adalah nilai *Operating Profit Margin*, *Pretax Profit Margin*, dan *Net Profit Margin* BPR lebih besar dari rasio *Benchmark* DJP, namun nilai rasio *Corporate Tax to Turn Over Ratio* BPR lebih kecil dari nilai rasio *Benchmark* DJP. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana adalah kinerja keuangan berpengaruh positif pada pembayaran pajak penghasilan badan.

Kata kunci: Kepatuhan, Behavioural Model Benchmarking, Rasio Keuangan, Kinerja Keuangan, Pembayaran Pajak Penghasilan Badan

ABSTRACT

This study aims to determine whether the determination of the ratio of Behavioural Model Benchmarking by DGT for BPR sector in Badung are in accordance with the real conditions and to determine BPR financial performance effect to corporate income taxpayments. The object of this study is BPRs operating in Badung regency with 36 samples for a 3 year period, namely 2011-2013, using purposive sampling techniquesmethod. Data collected through secondary data. Analysis technique using the analysis of two different test sample average independent and simple linear regression analysis. The result of analysis of different test is a value Operating Profit Margin, pretax profit margin and net profit margin is greater than the ratio BPR Benchmark DJP, except the Corporate Tax rate to Turn Over Ratio value. The results of simple linear regression analysis is a positive influence on the financial performance of the corporate income tax payments.

Keywords: Compliance, Behavioural Model Benchmarking, Financial Ratios, Financial Performance, Corporate Income Tax Payments

PENDAHULUAN

Kemandirian merupakan sesuatu yang di cita-citakan oleh setiap bangsa yang berdaulat. Salah satu bentuk kemandirian yang di cita-citakan oleh setiap bangsa adalah kemampuan membiayai diri sendiri serta tidak bergantung pada pihak lain. Kemandirian yang diharapkan ini dapat terwujud dengan adanya turut serta dari semua warga negara dalam membiayai pembangunan dan jalannya pemerintahan melalui pembayaran pajak.

Hampir di semua negara pajak merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan negara tersebut. Karena pada dasarnya, pajak adalah hak dari setiap warga negara untuk turut berperan serta bagi bangsanya dan merupakan kontribusi tidak langsung anggota masyarakat kepada anggota masyarakat lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup bersama. Selain itu pajak merupakan bentuk pertanggungjawaban sosial dari tiap-tiap warga negara atas penggunaan fasilitas umum yang selama ini dinikmati dengan gratis. Dengan membayar pajak berarti memberikan secercah harapan akan masa depan yang lebih baik untuk semua.

Indonesia merupakan Negara yang termasuk dalam kategori Negara berkembang. Banyak usaha yang masih harus dilakukan Indonesia agar dapat menjadi Negara yang tergolong maju. Salah satu fokus usaha yang perlu dilakukan adalah di bidang pembangunan. Pembangunan di Indonesia membutuhkan uang yang tidak sedikit. Saat ini indonesia belum mampu untuk sepenuhnya mandiri dalam membiayai semua pengeluaran yang dibutuhkan termasuk pembangunan. Hal tersebut

disebabkan oleh belum mampunya penerimaan pajak untuk menutupi semua pengeluaran yang dibutuhkan.

Sejak tahun 2001 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan reformasi perpajakan secara bertahap, baik reformasi pegawai, modernisasi sistem perpajakan dan segala keperluan penunjangnya. Hal ini diharapkan mampu membuat Wajib Pajak merasa lebih nyaman, sehingga penerimaan negara dari sektor perpajakan diharapkan dapat terus meningkat hingga mampu membiayai semua pengeluaran yang dibutuhkan oleh Negara.

Hingga saat ini pajak tetap menjadi tulang punggung penerimaan Negara. Lebih dari 70% penerimaan Negara bersumber dari penerimaan pajak. Untuk dapat memenuhi target pendapatan pajak, DJP senantiasa melakukan pengawasan kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penggalan potensi perpajakan di semua lini. Salah satunya dilakukan melalui penilaian kewajaran kinerja keuangan berdasarkan rasio-rasio *Benchmarking* berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 tentang rasio *Total Benchmarking* dan petunjuk pemanfaatannya yang kemudian terus dikembangkan sehingga menjadi *Behavioural Model Benchmarking/Benchmarking Behavioural Model* yang diatur pembuatan dan tindak lanjutnya melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-40/PJ/2012. Peraturan ini dibuat untuk memudahkan aparat pajak/fiskus dalam membina wajib pajak dan menilai kepatuhan perpajakannya.

Benchmarking DJP menunjukkan rasio-rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan input-input perusahaan. Rasio keuangan merupakan alat yang sering

digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Dalam modul *Benchmarking* tahun 2013 DJP, rasio tersebut dibagi menjadi 3 bagian yaitu rasio kinerja operasional, rasio input, dan rasio aktivitas luar usaha. Rasio kinerja operasional terdiri dari *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Profit Margin* (OPM), *Pretax Profit Margin* (PPM), *Net Profit Margin* (NPM), dan *Corporate Tax to Turn Over Ratio* (CTTOR). Rasio input terdiri dari rasio biaya gaji terhadap penjualan, rasio biaya sewa terhadap penjualan, rasio biaya penyusutan terhadap penjualan, rasio biaya bunga terhadap penjualan, dan rasio input lainnya. Rasio aktivitas luar usaha terdiri dari rasio penghasilan luar usaha terhadap penjualan, dan rasio biaya luar usaha terhadap penjualan.

Rasio-rasio yang ditampilkan *Benchmark* DJP ini memang bukanlah angka mutlak yang harus terjadi, melainkan hanya sebagai acuan bagi fiskus dalam menilai kewajaran kinerja keuangan wajib pajak. Analisis *Benchmarking* dapat menjadi pedoman bagi fiskus untuk menilai tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Bagi perusahaan, *Benchmarking* ini dapat pula menjadi *trigger* (pemicu) untuk memperbaiki manajemen keuangan perusahaan.

Kabupaten Badung sebagai salah satu kabupaten di Bali merupakan kabupaten penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar bagi Provinsi Bali. Sekitar 78% lebih sumber pendapatannya dihasilkan oleh pendapatan asli daerah (PAD) sehingga hasilnya bahkan mampu memberikan bantuan kepada enam kabupaten lain di Bali.

Salah satu faktor pendorong pesatnya pertumbuhan ekonomi di kabupaten Badung ada di sektor perbankan. Salah satu hal yang menarik di sektor perbankan di

Bali adalah tingginya pertumbuhan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melebihi pertumbuhan bank umum. Berikut pada Tabel 1 perkembangan kegiatan usaha BPR konvensional di Bali dalam kurun waktu tahun 2010 s.d 2014.

Tabel 1.
Perkembangan Kegiatan Usaha BPR Konvensional di Provinsi Bali
Tahun 2010-2014 (dalam jutaan rupiah)

Indikator	Desember 2010	Desember 2011	%	Desember 2012	%	Desember 2013	%	Desember 2014	%
Jumlah BPR (unit)	137	137	0%	137	0%	137	0%	137	0%
Sumber Dana	2.948.920	4.151.879	41%	5.456.143	31%	6.674.702	22%	8.034.860	20%
Tabungan	742.576	975.333	31%	1.255.595	29%	1.608.292	28%	2.130.338	32%
Deposito	1.588.475	2.278.497	43%	2.798.307	23%	3.350.176	20%	3.774.213	13%
Antarbank Pasiva	579.425	879.153	52%	1.382.956	57%	1.699.181	23%	2.116.690	25%
Pinjaman Diterima	38.443	18.895	-51%	19.285	2%	17.057	-12%	13.625	-20%
Penanaman Dana	3.275.303	4.622.737	41%	6.094.387	32%	7.463.848	22%	9.035.025	21%
Kredit Yg Diberikan	2.666.283	3.519.732	32%	4.753.974	35%	5.935.636	25%	7.119.820	20%
Antarbank Aktiva	609.019	1.103.005	81%	1.340.407	22%	1.528.213	14%	1.915.205	25%
Jumlah Dana Pihak Ketiga	2.331.051	3.253.831	40%	4.053.902	25%	4.958.465	22%	5.904.544	19%
Tabungan	742.576	975.333	31%	1.255.595	29%	1.608.292	28%	2.130.331	32%
Deposito	1.588.475	2.278.498	43%	2.798.307	23%	3.350.173	20%	3.774.213	13%
Total Asset	3.431.350	4.801.274	40%	6.325.565	32%	7.701.210	22%	9.380.308	22%

Sumber: Website Bank Indonesia, Tahun 2015

Kinerja BPR di Bali kian positif dan direspons masyarakat bahkan pertumbuhannya mencapai 26,73 persen lebih tinggi di atas pertumbuhan bank umum. Menurut Metrotvnews.com, BPR di Bali terpantau lebih banyak menyalurkan kredit kepada para pengusaha dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daripada menghimpun jumlah dana dari masyarakat atau menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK). Namun demikian bukan berarti DPK di Bali tidak

tumbuh. Dirangkum dari data statistik Bank Indonesia, aset BPR konvensional di Pulau Dewata pada periode Desember 2014 mencapai Rp9,4 triliun naik 22% dibandingkan dengan periode Desember 2013. Penopang pertumbuhan itu adalah tumbuhnya DPK sebesar 22% menjadi Rp5,9 triliun dari periode sebelumnya Rp4,9 triliun.

Pertumbuhan BPR yang besar membuat Direktorat Jenderal Pajak menaruh perhatian pada hal ini. Pertumbuhan ekonomi seharusnya sejalan dengan pertumbuhan kepatuhan dalam kewajiban perpajakannya. Karena perkembangan BPR yang sedang pesat di Bali maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis komparasi kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan dari laporan keuangan seluruh BPR yang beroperasi di wilayah kabupaten Badung dalam periode tahun 2011-2013 dibandingkan dengan rasio *Benchmarking Behavioural Model* pajak serta pengaruh rasio keuangan tersebut pada pembayaran PPh badannya.

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Bank merupakan salah satu wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, oleh karena itu BPR wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah dibuat saat menyampaikan SPT Tahunan kepada KPP tempat BPR tersebut terdaftar.

Namun tidak hanya kepada KPP, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 2015, dalam rangka transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank, Bank wajib menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan Laporan Publikasi, yaitu laporan keuangan, informasi kinerja keuangan dan/atau informasi lain, yang disampaikan oleh Bank kepada masyarakat dan/atau OJK dengan tata cara penyampaian dan pengumuman sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Peraturan OJK Nomor 6/POJK.03/2015 tersebut mencabut peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, dimana kewajiban Bank umum untuk menyampaikan laporan publikasi sudah dimulai sejak tanggal Juni 1998 yang diatur pertama kali dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/40/KEP/DIR tanggal 9 Juni 1998 tentang Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Umum.

Salah satu penyebab nilai rasio keuangan riil wajib pajak lebih kecil dibandingkan dengan nilai rasio *Benchmarking behaviour model* disebabkan karena laporan keuangan dalam SPT yang diberikan kepada DJP tidak mencerminkan kegiatan usaha wajib pajak yang sebenarnya. Ketidaksesuaian laporan yang disampaikan akan menjadi indikasi *Corporate Governance* yang tidak baik. Indikasi *Corporate Governance* yang tidak baik tentu akan mengganggu kepercayaan masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam penelitian yang dilakukan Solomon (2007) menunjukkan perkembangan terkini

bahwa *Corporate Governance* dimaksudkan untuk tujuan yang lebih luas, yaitu untuk kepentingan *stakeholders*, dibanding sebatas pemegang saham. *Corporate Governance* mencakup usaha pencapaian tujuan jangka panjang, yaitu pencapaian tujuan kesejahteraan *stakeholders* yang merujuk kepada pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi oleh keputusan kebijakan, dan operasi perusahaan. Penelitian ini membuktikan bahwa *Good Corporate Governance* adalah hal yang sangat penting untuk dijaga demi menjaga kepercayaan *stakeholders*. Sehingga BPR pun seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat sebagai *stakeholders* terbesarnya dengan tidak melakukan tindakan dengan membuat perbedaan antara laporan keuangan yang disampaikan kepada KPP dengan laporan publikasi yang diumumkan. Karena jika laporan yang disampaikan sama, maka seharusnya nilai rasio keuangan yang dihasilkan juga akan sama. Penyebab lain lebih rendahnya rasio keuangan riil wajib pajak dibandingkan dengan rasio *Benchmarking behaviour model* adalah kondisi usaha wajib pajak memang menurun atau lebih rendah dibandingkan dengan usaha lain yang sejenis.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Theresia (2011) terhadap empat perusahaan rokok menunjukkan adanya perbedaan rasio laporan keuangan mereka dengan rasio *Benchmarking* DJP, dimana nilai rasio GPM, OPM, PPM, dan NPM dari empat perusahaan rokok tersebut lebih kecil dari nilai rasio *Benchmarking* DJP. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bayu (2012) terhadap perusahaan yang bergerak pada sektor perantara keuangan juga menunjukkan adanya perbedaan rasio laporan keuangan mereka dengan rasio *Benchmarking* DJP. Dari hasil penelitian Bayu

tersebut, untuk perusahaan dengan klasifikasi usaha perbankan nilai rasio GPM, OPM, PPM, NPM dan CCTOR lebih besar dibanding nilai rasio *Benchmarking* DJP. Untuk perusahaan dengan klasifikasi usaha asuransi, nilai rasio GPM, OPM, PPM, dan NPM lebih besar dibandingkan dengan nilai rasio *Benchmarking* DJP, namun untuk rasio CTTOR ternyata lebih kecil dibanding dengan nilai *Benchmarking* DJP. Untuk perusahaan dengan klasifikasi usaha pembiayaan konsumen, nilai rasio GPM, OPM, PPM, NPM dan CTTOR perusahaan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai rasio *Benchmarking* DJP.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka perlu diteliti perbandingan antara rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan BPR dengan rasio *Benchmarking* DJP. Tingginya pertumbuhan BPR di kabupaten Badung seharusnya diikuti dengan meningkatnya laba karena BPR termasuk dalam perusahaan yang berorientasi pada laba. Angka pertumbuhan yang positif setiap tahun seharusnya menghasilkan nilai rasio keuangan yang baik. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

- H_{1a}: Nilai rata-rata rasio OPM BPR lebih besar dari nilai batas bawah rasio OPM *Benchmarking Behavioural Model*
- H_{1b}: Nilai rata-rata rasio PPM BPR lebih besar dari nilai batas bawah rasio PPM *Benchmarking Behavioural Model*
- H_{1c}: Nilai rata-rata rasio NPM BPR lebih besar dari nilai batas bawah rasio NPM *Benchmarking Behavioural Model*
- H_{1d}: Nilai rata-rata rasio CTTOR BPR lebih besar dari nilai batas bawah rasio CCTOR *Benchmarking Behavioural Model*

Kinerja perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan individu yang dibuat secara terus menerus oleh pihak manajemen suatu perusahaan. Kinerja berarti pula bahwa dengan masukan tertentu untuk memperoleh keluaran tertentu. Secara implisit definisi kinerja mengandung suatu pengertian adanya suatu efisiensi yang dapat diartikan secara umum sebagai rasio atau perbandingan antara masukan dan keluaran. Kinerja perusahaan sebagai emiten di pasar modal merupakan prestasi yang dicapai perusahaan yang menerbitkan saham yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi (*operating result*) perusahaan tersebut dan biasanya diukur dalam rasio-rasio keuangan (Siregar, 2010).

Menurut Fahmi (2012) kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat hasil kinerja suatu perusahaan dari kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Nainggolan (2004) dalam Christiani (2010) menyatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu aspek penilaian yang fundamental mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dapat dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio-rasio keuangan perusahaan, antara lain: rasio likuiditas, rasio *leverage*, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.

Berdasarkan teori dapat disimpulkan bahwa kesehatan perusahaan tercermin dari kinerja keuangannya. Kinerja keuangan juga mencerminkan tingkat margin laba.

Semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan maka semakin besar margin laba. Saat laba perusahaan meningkat maka seharusnya semakin banyak PPh yang terutang. Tingkat pertumbuhan BPR khususnya di kabupaten Badung selama 2011-2013 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Berdasarkan data pertumbuhan yang meningkat maka pembayaran PPh Badan yang dilakukan seharusnya meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2013) dan Mariwan (2005) menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pembayaran PPh. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₂: Kinerja keuangan BPR berpengaruh positif pada pembayaran PPh Badan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif statistik dan non statistik dengan rancangan penelitian yang dibutuhkan untuk menganalisis penelitian mengenai “Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Di Wilayah Kabupaten Badung Berbasis Rasio *Benchmarking Behavioural Model* dan Pengaruhnya Terhadap Pembayaran Pajak”.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif berbentuk komparatif dan kausalitas. Menurut Nazir (2005: 58) penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Menurut Sugiyono (2010) desain kausal adalah penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel

independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi).

Kegiatan penelitian dilakukan di dua tempat yaitu KPP Pratama Badung Selatan yang beralamat di Jl. Kapten Tantular No.4, Renon, Denpasar, Bali, dan KPP Pratama Badung Utara yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.100, Denpasar, Bali. Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan publikasi BPR yang beroperasi di wilayah kabupaten Badung, SPT Tahunan PPh Badan yang telah dilaporkan BPR tersebut, serta data pembayaran pajak yang sudah dilakukan selama tahun 2011-2013. Penelitian ini terbatas sampai tahun 2013 disebabkan karena data *Benchmark* untuk sektor usaha BPR di Bali hanya ada sampai tahun 2013. Saat penelitian ini dilakukan, data *Benchmark* usaha BPR di Bali untuk tahun 2014 dan 2015 masih belum ditetapkan oleh Kanwil DJP Bali.

Objek penelitian adalah fenomena atau masalah penelitian yang telah diabstraksi menjadi suatu konsep atau variabel (Silalahi, 2009:191). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi di wilayah kabupaten Badung untuk periode tahun 2011-2013 dibandingkan dengan rasio *Benchmarking Behavioural Model* yang ditetapkan DJP serta pengaruhnya terhadap pembayaran PPh badan.

Menurut Sugiyono (2010) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai orang yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan ditarik kesimpulannya. *Behavioural Model* dibagi menjadi 3 bagian yaitu rasio kinerja operasional, rasio input, dan rasio aktivitas luar usaha. Dalam

meneliti perbandingan antara rasio keuangan BPR dengan rasio *Benchmarking behavioural model*, penelitian ini hanya berfokus pada rasio kinerja operasional yang terdiri dari *Operating Profit Margin (OPM)*, *Pretax Profit Margin (PPM)*, *Net Profit Margin (NPM)*, dan *Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)*. *Gross Profit Margin (GPM)* tidak diuji karena laporan keuangan BPR tidak memiliki harga pokok penjualan sehingga nilai GPM dalam laporan keuangan BPR pasti sama dengan nilai OPM. Rasio input dan rasio aktivitas luar usaha juga tidak diuji karena tidak semua BPR memiliki rasio ini.

Rasio keuangan BPR yang akan diuji adalah rasio keuangan BPR yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan dan KPP Pratama Badung Utara. BPR yang terdaftar di KPP Madya Denpasar tidak diuji karena wilayah kerja KPP Madya adalah seluruh provinsi Bali sehingga BPR yang terdaftar di KPP Madya Denpasar tidak hanya BPR yang beroperasi di wilayah kabupaten Badung saja namun juga termasuk di wilayah kabupaten lain di Bali. Di samping itu, BPR yang terdaftar di KPP Pratama menggunakan perhitungan nilai rasio *Benchmarking behavioural model* untuk bisnis skala kecil, sementara BPR yang terdaftar di KPP Madya menggunakan perhitungan nilai rasio *Benchmarking behavioural model* untuk bisnis skala menengah sehingga nilai rasio *Benchmarking behavioural model* yang ditetapkan oleh DJP untuk KPP Pratama dan KPP Madya akan berbeda.

Dalam meneliti pengaruh kinerja keuangan terhadap pembayaran PPh badan, akan diuji menggunakan analisis regresi sederhana. Penelitian tidak menggunakan analisis regresi berganda karena variabel bebas dalam penelitian ini hanya ada satu.

Kinerja keuangan merupakan variabel bebas (X) dan jumlah pembayaran PPh badan merupakan variabel terikat (Y).

Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka (Sugiyono, 2010), dalam hal ini adalah laporan keuangan BPR yang beroperasi di wilayah kabupaten Badung, data SPT Tahunan PPh badan yang telah dilaporkan serta data pembayaran pajak BPR di kabupaten Badung untuk tahun 2011-2013. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak di luar perusahaan namun berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2010), dalam hal ini ialah laporan publikasi BPR yang dilaporkan kepada OJK setiap triwulan, laporan SPT Tahunan PPh Badan yang telah disampaikan serta data pembayaran pajak BPR di kabupaten Badung.

Populasi dalam penelitian ini adalah BPR yang beroperasi di wilayah kabupaten Badung pada tahun 2011-2013. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah melainkan didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Arikunto, 2010).

Populasi penelitian adalah seluruh BPR yang beroperasi di kabupaten Badung tahun 2011-2013. BPR yang beroperasi sejumlah 52 BPR dimana 14 BPR terdaftar di KPP Badung Selatan, 24 BPR terdaftar di KPP Badung Utara, dan 14 BPR terdaftar di KPP Madya Denpasar. Semua BPR menyampaikan SPT dengan lengkap kepada DJP namun ada 2 BPR yang tidak menyampaikan laporan publikasi secara rutin kepada OJK sehingga BPR yang menjadi sampel penelitian sesuai dengan *purposive*

sampling berjumlah 36 BPR. Penentuan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2.
Purposive Sampling

BPR konvensional yang beroperasi di kabupaten Badung/populasi	52
BPR yang tidak terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan atau di KPP Pratama Badung Utara	(14)
BPR yang tidak rutin menyampaikan laporan publikasi kepada OJK	(2)
BPR yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan	(0)
BPR yang menjadi sampel	36

Sumber: Data sekunder diolah (2016)

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari *Website* Otoritas Jasa Keuangan untuk melihat laporan keuangan publikasi dari setiap BPR, serta data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak untuk melihat laporan SPT Tahunan PPh Badan dan pembayaran yang dilakukan oleh BPR yang akan diteliti.

Pengujian hipotesis 2 mengenai pengaruh rasio kinerja keuangan terhadap pembayaran PPh badan dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Rumus regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Y = Pembayaran PPh Badan

X = Kinerja Keuangan

a = Konstanta (nilai Y apabila X = 0)

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel penelitian melalui nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan deviasi standar. Analisis statistik deskriptif berdasarkan rasio keuangan BPR per tahun selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3.
Rasio Keuangan BPR Tahun 2011 s.d 2013

	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
OPM	108	-100,39%	44,78%	17,27%	15,92%
PPM	108	-100,40%	44,48%	17,41%	15,96%
NPM	108	-100,60%	44,48%	15,17%	15,39%
CTTOR	108	0,00%	5,48%	2,26%	1,10%

Sumber: Data sekunder diolah (2016)

Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat diketahui statistik deskriptif dari variabel-variabel dalam penelitian ini. Nilai minimum menggambarkan rasio profitabilitas terendah yang dicapai BPR yang termasuk dalam sampel penelitian. Nilai minimum OPM, PPM, dan NPM sebesar (100,39)%, (100,40)%, dan (100,60)%. Nilai rasio negatif tersebut berarti BPR mengalami kerugian. Nilai CTTOR terendah sebesar 0% (nol persen) berarti BPR sama sekali tidak membayar pajak penghasilan.

Nilai maksimum menggambarkan rasio profitabilitas tertinggi yang dicapai BPR yang termasuk dalam sampel penelitian. Nilai maksimum OPM, PPM, NPM dan CTTOR adalah sebesar 44,78%, 44,48%, 44,48%, dan 5,48%. Nilai rata-rata OPM dan PPM sebesar 17,27% dan 17,41% berarti rata-rata rasio OPM dan PPM dari BPR yang termasuk dalam sampel berada di angka 17%. Rata-rata PPM lebih besar dari OPM berarti sebagian besar BPR memiliki penghasilan di luar usaha/kegiatan operasional. Rata-rata CTTOR sebesar 2,26% berarti bahwa rata-rata pembayaran PPh badan yang dilakukan oleh BPR sampel sebesar 2,26% dari omset BPR sampel.

Tabel 4.
Statistik Uji Mann-Whitney Untuk Rasio OPM

	Code	N	Mean Rank	Sum of Ranks
X1	OPM DATA RASIO BPR	108	116,83	12.618
	OPM DATA <i>BENCHMARK</i> DJP	108	100,17	10.818
	Total	216		

Sumber: Data sekunder diolah (2016)

Rata-rata rasio OPM BPR adalah sebesar 116,83% dan rata-rata rasio OPM *Benchmark* DJP adalah 100,17%. Jika dibandingkan, maka rata-rata rasio OPM BPR > rata-rata rasio OPM *Benchmark* DJP.

Tabel 5.
Hasil Uji Mann Whitney Untuk Rasio OPM

	X1
Mann-Whitney U	4.932
Wilcoxon W	10.818
Z	-1,973
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,048

Sumber: Data Sekunder Diolah (2016)

Berdasarkan hasil uji *independent sample* menunjukkan bahwa rasio OPM BPR berbeda secara signifikan dengan rasio OPM *Benchmark* DJP. Hal tersebut terbukti dengan melihat tingkat signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar $0,048 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio OPM BPR berbeda dengan rasio OPM *Benchmark* DJP.

Tabel 6.
Statistik Uji Mann-Whitney Untuk Rasio PPM

	Code	N	Mean Rank	Sum of Ranks
X2	PPM DATA RASIO BPR	108	119,50	12.906
	PPM DATA <i>BENCHMARK</i> DJP	108	97,50	10.530
	Total	216		

Sumber: Data Sekunder Diolah (2016)

Rata-rata rasio PPM BPR adalah sebesar 119,50% dan rata-rata rasio PPM *Benchmark* DJP adalah 97,50%. Jika dibandingkan, maka rata-rata rasio PPM BPR > rata-rata rasio PPM *Benchmark* DJP.

Tabel 7.
Hasil Uji Mann Whitney Untuk Rasio PPM

	X2
Mann-Whitney U	4.644
Wilcoxon W	10.530
Z	-2,605
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,009

Sumber: Data Sekunder Diolah, (2016)

Berdasarkan hasil uji *independent sample* menunjukkan bahwa rasio PPM BPR berbeda secara signifikan dengan rasio PPM *Benchmark* DJP. Hal tersebut terbukti dengan melihat tingkat signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar $0,009$

<0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio PPM BPR berbeda dengan rasio PPM *Benchmark* DJP.

Tabel 8.
Statistik Uji Mann-Whitney Untuk Rasio NPM

	code	N	Mean Rank	Sum of Ranks
X3	NPM DATA RASIO BPR	108	128,17	13.842
	NPM DATA <i>BENCHMARK</i> DJP	108	88,83	9.594
	Total	216		

Sumber: Data Sekunder Diolah (2016)

Rata-rata rasio NPM BPR adalah sebesar 128,17% dan rata-rata rasio PPM *Benchmark* DJP adalah 88,83%. Jika dibandingkan, maka rata-rata rasio NPM BPR > rata-rata rasio NPM *Benchmark* DJP.

Tabel 9.
Hasil Uji Mann Whitney Untuk Rasio NPM

	X3
Mann-Whitney U	3.708
Wilcoxon W	9.594
Z	-4,657
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,000

Sumber: Data Sekunder Diolah, (2016)

Berdasarkan hasil uji *independent sample* menunjukkan bahwa rasio NPM BPR berbeda secara signifikan dengan rasio NPM *Benchmark* DJP. Hal tersebut terbukti dengan melihat tingkat signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio NPM BPR berbeda dengan rasio NPM *Benchmark* DJP.

Tabel 10.
Hasil Uji Mann Whitney Untuk Rasio CCTOR

	Code	N	Mean Rank	Sum of Ranks
X4	CTTOR DATA RASIO BPR	108	85,17	9.198
	CTTOR DATA <i>BENCHMARK</i> DJP	108	131,83	14.238
	Total	216		

Sumber: Data Sekunder Diolah (2016)

Rata-rata rasio CCTOR BPR adalah sebesar 85,17% dan rata-rata rasio CCTOR *Benchmark* DJP adalah 131,83%. Jika dibandingkan, maka rata-rata rasio CCTOR BPR < rata-rata rasio CCTOR *Benchmark* DJP.

Tabel 11.
Hasil Uji Mann Whitney Untuk Rasio CCTOR

	X4
Mann-Whitney U	3.312
Wilcoxon W	9.198
Z	-5,526
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,000

Sumber: Data Sekuder Diolah (2016)

Berdasarkan hasil uji *independent sample* menunjukkan bahwa rasio CCTOR BPR berbeda secara signifikan dengan rasio CCTOR *Benchmark* DJP. Hal tersebut terbukti dengan melihat tingkat signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio CCTOR BPR berbeda dengan rasio CCTOR *Benchmark* DJP.

Nilai konstanta sebesar 42.956.806 dapat diartikan bahwa apabila *operating profit margin* adalah 0, maka tingkat pembayaran PPh badan nilainya Rp42.956.806,00. Koefisien regresi *operating profit margin* sebesar 72.282.727 dapat diartikan bahwa apabila variabel *operating profit margin* naik sebesar 1 persen,

dengan asumsi variabel lain nilainya konstan, maka akan mengakibatkan kenaikan pembayaran PPh badan sebesar Rp72.282.727,00. Tanda koefisien beta dari persamaan regresi yang diperoleh adalah positif, sehingga hubungan antara variabel X (Rasio OPM BPR) dan variabel Y (Pembayaran PPh Badan) adalah searah.

Tabel 12.
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	42.956.806	3.811.773		11,270	0,000
OPM	72.282.727	16.602.334	0,433	4,354	0,000

Sumber: Data Sekunder Diolah (2016)

$$\text{Pembayaran PPh Badan} = 42.956.806 + 72.282.727 \text{ OPM} + e$$

Keterangan:

OPM = *Operating Profit Margin*

e = Standar error

Nilai Sig.t sebesar $0,000 < 0,005$ dan koefisien regresi variabel yang bernilai positif sebesar 72.282.727, hal ini menunjukkan bahwa H_2 diterima dan H_0 ditolak, yang berarti bahwa kinerja keuangan dengan proksi *operating profit margin* berpengaruh positif terhadap pembayaran PPh badan.

Tabel 13.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R Square
1	0,188

Sumber: Data Sekunder Diolah (2016)

Berdasarkan Tabel 13 diperoleh nilai R^2 sebesar 0,188 (18,8%), berarti bahwa sebesar 18,8% variabel terikat Y (Pembayaran PPh Badan) dipengaruhi oleh variabel

bebas X (rasio NPM BPR), sedangkan sisanya sebesar 81,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi.

Hasil analisis rasio OPM menunjukkan bahwa rata-rata rasio OPM BPR adalah sebesar 116,83% dan rata-rata rasio OPM *Benchmark* DJP adalah 100,17%. Jika dibandingkan, maka rata-rata rasio OPM BPR lebih besar dari rata-rata rasio OPM *Benchmark* DJP. Berdasarkan hasil uji *Mann-Whitney* menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* rasio OPM sebesar 0,048 lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio OPM BPR berbeda dengan rasio OPM *Benchmark* DJP. Hal ini sesuai dengan hipotesis pertama (H_{1a}) yang menyatakan bahwa nilai rata-rata rasio OPM BPR lebih besar dari nilai batas bawah rasio OPM *Benchmarking Behavioural Model* sehingga hipotesis pertama diterima. Hasil penelitian rasio OPM BPR ini sama dengan hasil penelitian rasio OPM pada usaha perbankan dan asuransi yang dilakukan oleh Bayu (2012) dimana rasio OPM perbankan dan asuransi lebih besar dibandingkan dengan rasio OPM *Benchmarking* DJP. Hasil penelitian rasio OPM BPR ini menunjukkan bahwa rata-rata BPR di kabupaten Badung mampu mengelola dan menghasilkan laba yang baik dari kegiatan operasionalnya.

Hasil analisis rasio PPM menunjukkan bahwa rata-rata rasio PPM BPR adalah sebesar 119,50% dan rata-rata rasio PPM *Benchmark* DJP adalah 97,50%. Jika dibandingkan, maka rata-rata rasio PPM BPR lebih besar dari rata-rata rasio PPM *Benchmark* DJP. Berdasarkan hasil uji *Mann-Whitney* menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,009 lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05, sehingga

dapat disimpulkan bahwa rasio PPM BPR berbeda dengan rasio PPM *Benchmark* DJP. Hal ini sesuai dengan hipotesis kedua (H_{1b}) yang menyatakan bahwa nilai rata-rata rasio PPM BPR lebih besar dari nilai batas bawah rasio PPM *Benchmarking Behavioural Model* sehingga hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian rasio PPM BPR ini sama dengan hasil penelitian rasio PPM pada usaha perbankan dan asuransi yang dilakukan oleh Bayu (2012) dimana rasio PPM perbankan dan asuransi lebih besar dibandingkan dengan rasio PPM *Benchmarking* DJP. Hasil penelitian PPM BPR ini menunjukkan bahwa rata-rata BPR di kabupaten Badung mampu mengelola dan menghasilkan laba dari kegiatan operasional dan kegiatan lainnya dengan baik sehingga menghasilkan persentase laba sebelum pajak yang lebih tinggi dari *Benchmark* DJP.

Hasil analisis rasio NPM menunjukkan bahwa rata-rata rasio NPM BPR adalah sebesar 128,17% dan rata-rata rasio PPM *Benchmark* DJP adalah 88,83%. Jika dibandingkan, maka rata-rata rasio NPM BPR lebih besar dari rata-rata rasio NPM *Benchmark* DJP. Berdasarkan hasil uji *Mann-Whitney* menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio NPM BPR berbeda dengan rasio NPM *Benchmark* DJP. Hal ini sesuai dengan hipotesis ketiga (H_{1c}) yang menyatakan bahwa nilai rata-rata rasio NPM BPR lebih besar dari nilai batas bawah rasio NPM *Benchmarking Behavioural Model* sehingga hipotesis ketiga diterima. Hasil penelitian rasio NPM BPR ini sama dengan hasil penelitian rasio NPM pada usaha perbankan dan asuransi yang dilakukan oleh Bayu (2012) dimana rasio NPM perbankan dan asuransi lebih

besar dibandingkan dengan rasio NPM *Benchmarking* DJP. Hasil penelitian NPM BPR ini menunjukkan bahwa rata-rata BPR di kabupaten Badung mampu menghasilkan persentase laba bersih yang lebih tinggi dari *Benchmark* DJP.

Hasil analisis rasio CCTOR menunjukkan bahwa rata-rata rasio CTTOR BPR adalah sebesar 85,17% dan rata-rata rasio CTTOR *Benchmark* DJP adalah 131,83%. Jika dibandingkan, maka rata-rata rasio CTTOR BPR lebih kecil dari rata-rata rasio CTTOR *Benchmark* DJP. Berdasarkan hasil uji *Mann-Whitney* menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio CTTOR BPR berbeda dengan rasio CTTOR *Benchmark* DJP. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis keempat (H_{1d}) yang menyatakan bahwa nilai rata-rata rasio CTTOR BPR lebih besar dari nilai batas bawah rasio CTTOR *Benchmarking Behavioural Model* sehingga hipotesis keempat ditolak. Hasil penelitian rasio CTTOR BPR ini berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bayu (2012) pada usaha perbankan dimana rasio CTTOR perbankan lebih besar dibandingkan dengan rasio CTTOR *Benchmarking* DJP namun sama dengan hasil penelitian pada usaha asuransi dimana rasio CTTOR asuransi lebih kecil dibandingkan dengan rasio CTTOR *Benchmarking* DJP. Hasil ini menunjukkan bahwa pembayaran PPh yang dilakukan oleh sebagian besar BPR di kabupaten Badung masih dibawah *Benchmark* DJP. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal antara lain: rendahnya tingkat kepatuhan BPR dalam membayar pajak, kurangnya pengetahuan karyawan BPR dalam hal perpajakan, adanya kompensasi kerugian dari

tahun pajak dibawah 2011, atau karena kesalahan DJP dalam menetapkan angka *Benchmarking* untuk rasio CTTOR.

Hasil penelitian ini sesuai dengan fakta meningkatnya pertumbuhan BPR di Bali dari tahun 2011 sampai dengan 2013 dimana nilai rata-rata rasio profitabilitas (OPM, PPM, dan NPM) yang dimiliki oleh BPR lebih besar dari nilai batas bawah rasio keuangan *Benchmarking Behavioural Model* mengindikasikan bahwa rata-rata BPR di Bali sudah memiliki kemampuan untuk menghasilkan margin laba yang baik. Namun terjadi anomali karena nilai rata-rata rasio CTTOR BPR lebih kecil dibandingkan dengan nilai CTTOR *Benchmark* DJP. Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut karena pertumbuhan laba seharusnya sejalan dengan meningkatnya jumlah pembayaran PPh. Hal ini dapat menjadi informasi awal bagi fiskus untuk meneliti lebih dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh BPR di kabupaten Badung. Hal ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi DJP untuk mengetahui apakah rasio *Benchmarking Behavioural Model* yang ditetapkan sudah sesuai dengan kondisi wajib pajak sesungguhnya atau tidak.

Hasil analisis regresi linier sederhana yang dilakukan untuk meneliti pengaruh kinerja keuangan BPR dengan proksi OPM terhadap pembayaran PPh Badan memiliki hasil nilai Sig.t sebesar 0,000 ($< 0,05$) dengan koefisien variabel yang positif menunjukkan bahwa kinerja keuangan BPR berpengaruh positif terhadap pembayaran PPh badan. Hasil ini sesuai dengan hipotesis pertama (H_2) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan BPR berpengaruh positif pada pembayaran PPh badan. Pengaruh positif kinerja keuangan pada pembayaran PPh badan ini sejalan

dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harahap (2013), dan penelitian Mariwan (2005) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin tinggi kinerja keuangan suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pembayaran PPh nya. Berlawanan dengan hasil uji beda rasio CTTOR, hasil uji regresi menunjukkan bahwa sebenarnya tingkat pembayaran PPh badan BPR di kabupaten Badung meningkat sejalan dengan meningkatnya kinerja keuangan BPR. Terjadinya anomali pada hasil pengujian rasio CCTOR BPR yang lebih kecil dari rasio CCTOR *Benchmark* DJP menguatkan dugaan bahwa nilai rasio CCTOR yang ditetapkan oleh DJP sebagai *Benchmarking* BPR mungkin tidak tepat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa nilai rata-rata rasio keuangan Bank Perkreditan rakyat yang beroperasi di wilayah kabupaten Badung periode tahun 2011-2013 lebih besar dibandingkan dengan nilai batas bawah rasio *Benchmarking* Behavioural Model yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak.

Kesimpulan masing-masing rasio yang dilakukan pengujian sebagai berikut 1) Nilai rata-rata rasio OPM lebih besar dari nilai batas bawah rasio OPM *Benchmark* DJP. Rata-rata BPR di daerah Badung memiliki kemampuan lebih baik dari *Benchmark* yang ditetapkan DJP dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. 2) Nilai rata-rata rasio PPM lebih besar dari nilai batas bawah rasio

PPM *Benchmark* DJP. Rata-rata BPR di daerah Badung memiliki kemampuan lebih baik dari *Benchmark* yang ditetapkan DJP dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasional maupun kegiatan lainnya. 3) Nilai rata-rata rasio NPM lebih besar dari nilai batas bawah rasio NPM *Benchmark* DJP. Rata-rata BPR di daerah Badung memiliki kemampuan lebih baik dari *Benchmark* yang ditetapkan DJP dalam menghasilkan laba bagi pemilik atau pemegang sahamnya. 4) Nilai rata-rata rasio CTTOR lebih kecil dari nilai batas bawah rasio CTTOR *Benchmark* DJP. Rata-rata BPR di daerah Badung memiliki kemampuan tidak lebih baik dari *Benchmark* yang ditetapkan DJP dalam membayar PPh. 5) Kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi di wilayah kabupaten Badung periode tahun 2011-2013 berpengaruh pada pembayaran PPh badan. OPM sebagai proksi dari kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pembayaran PPh badan. Berarti bahwa semakin tinggi nilai OPM (kinerja keuangan), maka semakin tinggi tingkat pembayaran PPh badan.

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan adalah bagi fiskus, *Benchmarking* dapat dijadikan sebagai indikasi awal adanya penyimpangan. Dari penelitian ini diketahui bahwa rata-rata nilai CTTOR BPR lebih kecil dari nilai batas bawah *Benchmark* DJP sehingga dapat menjadi acuan bagi fiskus untuk meneliti lebih lanjut terhadap kewajiban perpajakan BPR di Bali. Bagi BPR, *Benchmark* dapat menjadi acuan standar kinerja keuangan dibandingkan dengan kinerja keuangan BPR lain di kabupaten Badung. Bagi BPR yang kinerja keuangannya masih dibawah *Benchmark* diharapkan bagi manajemen BPR tersebut untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Bagi BPR yang kinerja

keuangannya di atas *Benchmark* diharapkan agar mempertahankan kinerja keuangannya tersebut.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Bayu Sarjono dan Kautsar Riza Salman. 2014. Total *Benchmarking* Sebagai Alat Menilai Kewajaran Laporan Keuangan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Keuangan. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.
- Bisnis.com. 2015. Finansial <<http://bali.bisnis.com/read/20150604/3/52206/dana-pihak-ketiga-bpr-bali-tumbuh-226>> [diakses pada 21 November 2015]
- Christiani. S, Devi. 2010. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan dan Kinerja Saham Sebelum dan Sesudah Seasoned Equity Offerings Pada perusahaan Manufaktur di BEI. *Tesis Program Magister Manajemen Universitas Udayana, Denpasar*.
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Harahap, Nuda Kartika. 2013. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pajak Penghasilan Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Negara. *Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2014. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. PMK Nomor 74 Tahun 2012
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Tentang Pembuatan Benchmark Behavioral Model Dan Tindak Lanjutnya*. SE Nomor 40 Tahun 2012.
- Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. UU Nomor 36 Tahun 2008.
- Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. UU Nomor 16 Tahun 2009.

- Mariwan. 2005. Analisis Kinerja Keuangan dan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Usaha Pada Periode Sebelum dan Setelah Reformasi Pajak Tahun 2000. *Kajian Bisnis dan Manajemen*, h: 67-84.
- Nasser, Akeil Kadasah dan Turki Mohammad Al Ahmari. 2013. An Analysis of *Benchmarking* of Business Functions in Organizations of Saudi Arabia. *International Journal of Business and Management*, 8(12), pp: 62-72.
- Siregar, Sheila Ramadhani. 2010. Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Harga Saham dengan Menggunakan Rasio Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara*, Medan.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Theresia Woro Damayanti dan Adiritonga, Eko Sukmono. 2011. Ratio Total *Benchmarking* Sesuikah Dengan Kondisi Wajib Pajak? (Studi Pada Empat Perusahaan Rokok yang Terdaftar di BEI). *Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan*.
- Wikipedia. 2012. *Benchmark*<<https://id.wikipedia.org/wiki/Benchmark>> [diakses pada 7 Oktober 2015]